



## BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PROGRAM PENCEGAHAN KEBAKARAN BERBASIS DESA

Ardiyan Saptawan, Lili Erina, Ermanovida  
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta upaya pencegahan kebakaran berbasis desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang efektif adalah berupaya menanamkan rasa kebutuhan dari dalam diri masyarakat setempat atas kebersihan udara dan bebasnya lahan pertanian dan pemukiman mereka dari ancaman api. Tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah membangun desa mandiri ramah lingkungan.

**Kata kunci :** *Kebakaran hutan, pencegahan kebakaran, pemberdayaan desa*

### I. PENDAHULUAN

Peristiwa kebakaran hutan adalah masalah yang rumit. Dalam suatu wilayah yang luas dengan keberadaan penduduk yang jarang seringkali peristiwa terjadinya kebakaran hutan dan lahan baru diketahui setelah kebakarannya membesar. Kesulitan ini semakin rumit jika hutan dan lahan yang terbakar tersebut berada di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk dan sumber air. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki luas 19.023,47 Km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk sekitar 35 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terdiri atas 18 kecamatan. Tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahannya sangat tinggi. Pada tahun 2015, Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan kabupaten dengan penyumbang titik panas (*hotspot*) paling banyak di antara kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki lahan Gambut cukup luas merupakan daerah yang memiliki penyebaran titik panas (*hotspots*) terbanyak. Tahun 2015 jumlah *hotspots* di Kabupaten Ogan Komering Ilir mencapai 16.629 *hotspots* jumlah ini lebih banyak sebesar 393,21 persen jika dibanding tahun 2014, dimana tahun 2014 jumlah *hotspots* hanya mencapai 4.229 *hotspots*. Sehingga dari dampak kejadian ini, hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terbakar mencapai 377.331 hektar di tahun 2015 dan 196.063 hektar selama tahun 2014, atau mengalami peningkatan sebesar 192,49 persen. Keadaan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 adalah kejadian yang luar biasa, namun walaupun demikian kondisinya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak meningkatkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, status darurat tetap pada level status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan hingga akhir tahun 2015.



Pada tahun 2016, terjadi kebakaran hutan dan lahan pada 30,6 hektar dengan *hotspots* hanya sekitar 10 titik. hal ini berdasarkan kajian BMKG dipengaruhi fenomena La Nina (Sumber: BPBD Kab.OKI, 2016). Pada tahun 2017 terjadi musim kemarau pada bulan Mei-July. Akan tetapi musim kemarau 2017 ini masih rendah dibanding pada tahun 2015.

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir mengakibatkan terjadinya 48.541 kasus penderita ISPA. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jika dibanding tahun 2014 yang tetrctat 16.774 kasus atau jumlah penderita. ISPA merupakan salah satu jenis penyakit pernapasan yang seringkali menyerang bayi, anak-anak, dan orang dewasa ketika kualitas udara tidak sehat. Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami udara yang buruk akibat timbulnya Asap. Sesuai hasil kajian yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Ogan Komering Ilir, kualitas Udara telah mencapai level “Tidak Sehat” dengan nilai 101-199. Kondisi ini lebih buruk jika dibandingkan pada tahun 2014, yang berada pada level “Sedang” dengan nilai partikulat budara berada pada kisaran 70-90. Jarak pandang di Kabupaten Ogan Komering ilir sangat pendek diperkirakan hanya mencapai 200 meter. Hal ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa akibat Asap telah menimbulkan dampak terhadap gangguan kesehatan Penduduk, gangguan jarak pandang, dan kerusakan lingkungan.

Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyangkut faktor alam, tetapi juga adalah faktor manusia. Penyebab yang berasal dari alam seperti faktor musim dan lahan gambut yang mudah terbakar, serta kandungan mineral alami yang tidak dapat dihindari. Penyebab yang berasal dari faktor manusia disebabkan kurangnya pemahaman atau arti penting hutan dan dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar.

## II. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada tahun 2016, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di OKI sekitar 30,6 hektar dengan 10 titik *hotspots*. Keadaan ini terjadi karena selama tahun 2016 terjadi Curah hujan yang berlangsung sepanjang tahun 2016 sehingga menjadi faktor alam yang menyebabkan lahan menjadi basah dan bahkan terendam air. Kondisi alam tersebut disebabkan oleh tidak terjadinya kemarau. Hal ini berdasarkan kajian BMKG dipengaruhi fenomena La Nina. Kendati demikian, bukan berarti kegiatan penanggulangan bencana vacum selama tahun 2016, justru kondisi yang tidak memiliki risiko dimanfaatkan dengan sebaik mungkin diantaranya memperkuat perangkat hukum, sosialisasi, perekrutan dan pelatihan relawan, pembentukan desa-desa orientasi terhadap penguatan kapasitas bencana kebakaran hutan dan lahan seperti relawan Desa Tangguh Bencana (Destana), Desa Makmur Peduli Api (DMPA), Masyarakat Peduli Api (MPA) serta peningkatan keterampilan SATGAS Bencana yang kesemuanya berjumlah 641 orang yang tersebar di desa-desa dan kecamatan yang dikategorikan rawan dan berisiko terjadi kebakaran hutan dan lahan, personil tersebut nantinya akan dijadikan ujung tombak dalam upaya mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di tahun 2017 dan tahun-tahun yang akan datang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengendalian adalah fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan/ kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman, patokan, pengaturan atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pencegahan adalah tindakan atau investasi yang diperlukan



dalam menghadapi bahaya dekat. Berbeda dari mitigasi, yang merupakan strategi yang permanen, pencegahan dipandang sebagai satu set pra-bencana kegiatan (Sumber: [id.earthquake-report.com](http://id.earthquake-report.com))

Kasus kebakaran hutan yg membekap Indonesia khususnya di Kabupaten OKI tahun 2015 ini terlihat sudah beralih jadi suatu tragedi yg tidak dapat usai. Jumlah titik api semakin tidak mampu terkontrol, luasan wilayah terdampak kabut asap pula semakin menggila. Personel pemerintah bukan tidak punyai strategi, tapi jikalau di bandingkan sumber daya yg dipunyai bersama jumlah titik kebakaran hutan, terang teramat tidak berimbang. Apabila tidak ada hujan deras yg mengguyur, tidak sedikit pihak meragukan apabila kebakaran hutan bakal padam seutuhnya.

Berkata lebih spesifik menyangkut kasus kebakaran hutan yang mengepung Sumatera, salah satu daerah yang jadi penyumbang kobaran api paling parah di lihat dari kuantitas titik apinya yaitu Kab Ogan Komering Ilir (OKI), Propinsi Sumatera Selatan. Dari ribuan hektare lahan di Kab Ogan Komering Ilir inilah pekatnya kabut asap terbawa sampai ke Riau, Jambi, Medan, bahkan Banda Aceh. Berbagai upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan bersama dengan pemerintah adalah sebagai berikut :

#### A. Pencegahan

1. Koordinasi para pihak (masyarakat, Pemda, praktisi, pemegang ijin usaha, LSM, TNI/POLRI, akademisi)
  - a. Koordinasi program dan anggaran terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
  - b. Mengembalikan jejaring kerja yang mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
  - c. Sharing informasi dan teknologi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Penyadartahuan dan pendampingan masyarakat
  - a. Menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan perubahan sikap.
  - b. Meningkatkan peran serta dan dukungan dari para pihak (Pemda, TNI dan POLRI, Perusahaan perkebunan dan kehutanan, LSM, dll).
  - c. Merangkul masyarakat dan pihak terkait sampai tingkat tapak melalui patroli bersama masyarakat dan Tim Pendamping Desa (TPD).
3. Deteksi dan Peringatan Dini
  - a. Deteksi hotspot melalui satelit
  - b. Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran
  - c. Penyebarluasan informasi early warning system (melalui deteksi hotspot, SPBK, tingkat kerawanan) melalui papan pengumuman dan selebaran
  - d. Pengembangan posko Dalkarhutla
4. Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) / hujan buatan.
5. Penataan pengelolaan air di daerah gambut.

#### B. Pemadaman

Proses pemadaman kebakaran hutan antara lain:

1. Pemadaman dari Darat.

Pemadaman dilakukan oleh Kerjasama antara Manggala Agni, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/ POLRI, Satgas Dalkar, Regu Pemadam Kebakaran (RPK) swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan unsur masyarakat lainnya.
2. Pemadaman dari Udara



Pemadaman berupa Water Bombing dan teknologi modifikasi cuaca/ hujan buatan yang didukung oleh BNPB, BPPT, dan TNI/POLRI.

C. *Penanganan Pasca*

1. Identifikasi: areal bekas terbakar, penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi terbakar, pengaruh terhadap lingkungan/ ekosistem dan informasi untuk mendukung penegakan hukum.
2. Monitoring dan pemeriksaan lokasi terbakar.
3. Penegakan hukum (Ditjen Penegakan Hukum KLHK, POLRI dan Kejaksaan).
4. Pelaporan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah saatnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan ditangani secara terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Dengan kata lain, bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak hanya tertuju pada pemadaman saat kebakaran hutan musim kemarau, tetapi hal-hal lain yang bersifat pencegahan harus direncanakan dan dilakukan berkelanjutan baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan.

Upaya pencegahan kebakaran berbasis desa

Lambatnya pengendalian hutan dan lahan disebabkan oleh peran pemerintah dan masyarakat belum nyata yaitu masih terpusat pada aspek pemadaman sedangkan pemadaman belum dioptimalkan, dan peran para pihak Manggala Agni, satuan pengendalian kebakaran, regu pemadam, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) belum optimal, serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12 Tahun 2009 tentang tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan belum sepenuhnya mampu memfasilitasi dan meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi untuk menjamin pencegahan kebakaran di tingkat bawah (lapangan) secara lebih baik karena itu selayaknya sebelum dibuat strategi yang ditentukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan perlu suatu kegiatan yang ditujukan kepada upaya mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan dan sosial budaya serta kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana kebakaran secara riil. Kekutan dan kelemahan, serta peluang dan tantangan (SWOT) dari situasi yang dihadapi seharusnya dirumuskan sedemikian rupa secara proporsional sehingga didapat keadaan nyata (existing) yang faktual dalam melihat kemampuan yang utuh.

Dasar hukum strategi pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Daerah Kabupaten OKI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Bupati OKI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Ogan Komeirng Ilir
6. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 239/KEP/BPBD/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Penetapan Satu Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;



Tujuan strategi pengendalian pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

1. Berkurangnya titik api sebagai sumber bencana dengan pemadaman darat dan udara;
2. Menghindarkan kerugian lebih besar terhadap jumlah lahan yang terbakar;
3. Pengurangan dampak penderita penyakit pernapasan;
4. Pencegahan bencana wabah penyakit akibat kekeringan.

Penyebab masalah pengendalian api di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

1. Kurangnya rasa memiliki terhadap lahan.
2. Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pengendalian api.
3. Perhatian masyarakat terkonsentrasi hanya pada budidaya pertanian dan kurangnya perhatian terhadap hasil pertanian dan industri rumah tangga.

Hal tersebut dikarenakan masyarakat kurang dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang efektif adalah berupaya menanamkan rasa kebutuhan dari dalam diri masyarakat setempat atas kebersihan udara dan bebasnya lahan pertanian dan pemukiman mereka dari ancaman api. Hal ini berarti bahwa kita berupaya memberdayakan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah membangun desa mandiri ramah lingkungan dengan ciri :

- a. Tumbuhnya kemampuan masyarakat desa untuk merencanakan dan melaksanakan kontrol sosial terhadap lahan dan lingkungan ,
- b. Kegiatan ekonomi ramah lingkungan,
- c. Keterpaduan sosial dalam pembangunan desa.

Berkaitan dengan hal tersebut maka masyarakat dan pemerintah daerah selayaknya berperan dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui tindakan pengawasan, menegur pelaku, dan melaporkan kegiatan perilaku usaha skala besar.

Pemberdayaan desa merupakan suatu proses mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat desa untuk dalam pembangunan desa secara berkelanjutan sesuai dengan keadaan masyarakat setempat (kearifan lokal). Indikator keberhasilannya adalah tumbuhnya kemampuan dan motivasi masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah serta dapat mengambil keputusan secara bebas sesuai dengan pilihannya sehingga terampil dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan secara swadaya.

Karena itu maka untuk melakukan upaya pencegahan berbasis desa maka kita perlu melakukan :

1. Penguatan lembaga desa yg demokratis dan mempunyai hak dan tanggung jawab atas pengelolaan lahan ramah lingkungan.
2. Memfasilitasi organisasi dalam mengembangkan kemampuan sendiri agar pengelolaannya mandiri dan berkelanjutan.
3. Pelaksanaan pemberdayaan diselenggarakan melalui pendekatan partisipatif :
  - a. Adanya asas kemitraan, demokrasi, akuntabilitas, keterbukaan, dan motivasi.
  - b. Adanya perencanaan yang baik melalui pendekatan partisipatif.
  - c. Keadaan sosio-kultural masyarakat,
  - d. Perhatian terhadap aspek kepentingan dan kebutuhan masyarakat.



#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu daerah yang jadi penyumbang kobaran api paling parah di lihat dari kuantitas titik apinya yaitu Kab Ogan Komering Ilir (OKI), Propinsi Sumatera Selatan. Dari ribuan hektare lahan di Kab Ogan Komering Ilir inilah pekatnya kabut asap terbawa sampai ke Riau, Jambi, Medan, bahkan Banda Aceh. Berbagai upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan bersama dengan pemerintah antara lain pencegahan, pemadaman, penanganan pasca dan upaya pencegahan kebakaran berbasis desa.

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang efektif adalah berupaya menanamkan rasa kebutuhan dari dalam diri masyarakat setempat atas kebersihan udara dan bebasnya lahan pertanian dan pemukiman mereka dari ancaman api. Hal ini berarti bahwa kita berupaya memberdayakan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat dan pemerintah daerah selayaknya berperan dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui tindakan pengawasan, menegur pelaku, dan melaporkan kegiatan perilaku usaha skala besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, Leo. 2006. Kebijakan Publik, Cetakan ke Tiga. Jakarta: Suara Bebas
- [2] Bpbdoki.2015. *Laporan Kejadian dan Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015*. Kayuagung
- [3] Bpbdoki.2016. *Laporan Kejadian dan Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015*. Kayuagung
- [4] Creswell, John W.2016. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [5] Dwiyanto, Agus, dan kawan-kawan. 2003, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada